

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMODERASI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

***Pretisila Kartika Putri**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. HR. Boenyamin
No. 708, Purwokerto 53122, Jawa Tengah, Indonesia

*Email corresponding author : pretisila.kartika@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan pemoderasi pengawasan keuangan daerah. Data diambil dari 44 responden pegawai subbagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kebumen. Alat analisis menggunakan *Moderated Regression Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi (baik secara simultan maupun parsial) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah mampu memoderasi pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Pengawasan Keuangan Daerah

Abstract

This research is a survey with the aim to analyze factors that affect the local government financial reporting information quality with financial local government supervision as moderating variable. Data was taken from 44 respondents the financial subsection employees Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kebumen. The analysis tool use Moderated Regression Analysis. The research result showed that the human resources quality, internal control systems, information technology utilization and organizational commitment (both simultaneously and partially) have significant positive effect on the local government financial reporting information quality. Financial local government supervision be able to moderate the influence of human resources quality, internal control systems, information technology utilization and organizational commitment to local government financial reporting information quality.

Keyword : Human Resources Quality, Internal Control System, Information Technology Utilization, Organizational Commitment, Financial Local Government Supervision

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mensyaratkan laporan keuangan

pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif sebagaimana disyaratkan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2011 menunjukkan indikasi kerugian negara mencapai Rp20 triliun dengan 12.600 kasus dan pada tahun 2012 menjadi 12.947 kasus atau naik 347 kasus dengan potensi kerugian negara turun menjadi Rp9,7 triliun (BPK, IHPS 2011). Kerugian negara ini disebabkan oleh ketidakpatuhan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan penyimpangan administrasi, dengan penyebab terbesar adalah ketidakpatuhan (60 persen).

Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan bahwa Kebumen termasuk kabupaten yang memiliki rapor kurang baik atas laporan keuangan pemerintah daerahnya. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, opini LHP terhadap LKPD Kabupaten Kebumen hanya Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya sistem pengendalian intern di Kabupaten Kebumen. Kelemahan tersebut dikelompokkan menjadi : (1) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (2) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan (3) kelemahan sistem pengendalian intern (BPK, IHPS 2010). Salah satu kriteria dasar pemberian opini adalah evaluasi terhadap efektivitas SPI yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (BPK, IHPS 2010).

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pula suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel atau sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. Sumber daya manusia tersebut paling tidak harus menguasai tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai ketentuan atau peraturan yang telah ditentukan, padahal beberapa daerah belum memiliki kesiapan untuk hal tersebut, termasuk Kabupaten Kebumen. Fakta menunjukkan bahwa PNS di Kabupaten Kebumen yang telah lulus strata satu atau sarjana hanya sebesar 27,74 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2014). Terbatasnya jumlah SDM dalam hal ini PNS yang sarjana, terutama untuk bidang-bidang teknis penganggaran, akuntansi dan pengolahan keuangan merupakan tantangan yang berat terutama dalam menerapkan peraturan yang didasari ide-ide yang kompleks demi terciptanya tata pemerintahan yang baik.

Kabupaten Kebumen berhasil memperbaiki opini laporan keuangan pemerintah daerahnya dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2006 hingga 2010 menjadi Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) pada tahun 2011 dan 2012 (BPK, IHPS 2012). Peningkatan opini tersebut dapat terjadi karena adanya komitmen organisasi atau komitmen para pegawai di seluruh SKPD Kabupaten Kebumen terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (www.bpk.go.id). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah Kabupaten Kebumen yang semakin baik juga menjadi faktor yang mempengaruhi laporan keuangan pemerintah kabupaten Kebumen yang semakin berkualitas. Kabupaten Kebumen termasuk salah satu contoh dari beberapa pemerintah daerah yang relatif maju dalam meningkatkan transparansi keuangannya dengan penyediaan informasi melalui internet. Kabupaten Kebumen mendapat penghargaan ICT Pura 2013 kategori utama dan dinilai mampu memajukan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di daerahnya (Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, 2013).

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, dapat dikelompokkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi merupakan faktor internal pemerintah Kabupaten Kebumen yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun tak hanya faktor internal yang dapat mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kesepakatan antara Bupati Kebumen dengan BPK terkait adanya pengawasan keuangan daerah juga menjadi semangat bagi seluruh entitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas informasi LKPD Kabupaten Kebumen (www.bpk.go.id). Pengawasan keuangan daerah oleh BPK tersebut merupakan salah satu faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Kebumen yang diduga akan menguatkan atau melemahkan hubungan faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berbagai fenomena yang terjadi tersebut menjadi latar belakang yang menarik untuk diteliti mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan pemoderasi pengawasan keuangan daerah.

Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah? Dan apakah pengawasan keuangan daerah mampu memoderasi pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. dan untuk mengetahui kemampuan pengawasan keuangan daerah dalam memoderasi pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori kegunaan Informasi (*Decision – Usefulness Theory*)

Teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) dari informasi akuntansi dikemukakan dalam disertasi George J. Staubus untuk pertama kalinya pada tahun 1954. Teori kegunaan-keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Fitur kegunaan-keputusan nampak dalam ringkasan diagramis mengacu pada kriteria pilihan akuntansi dan pendekatan pembuktian dalam pengukuran aset dan laibilitas. Premis dari teori kegunaan-keputusan adalah

- a. Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi finansial mengenai perusahaan guna pengambilan keputusan
- b. Tujuan akuntansi dikaitkan dengan investor adalah menyediakan informasi financial mengenai suatu perusahaan yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan investasi
- c. Investor mencakup pengertian pemilik dan kreditur

Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi merupakan bagian dari teori normatif (Staubus, 2000 dalam Sukmaningrum, 2012). Teori normatif adalah teori yang didasarkan pada keyakinan yang seharusnya terjadi dalam kondisi tertentu, tidak hanya berdasarkan pada observasi. Contoh teori normatif lainnya adalah *Continuously Contemporary Accounting (CoCoA)* yang dinyatakan oleh Chambers (1966) dalam Sukmaningrum (2012). Teori normatif tidak mengevaluasi mengenai praktik akuntansi yang sebenarnya tetapi lebih menggambarkan bagaimanakan praktik tertentu itu seharusnya dilakukan. Walaupun kadang-kadang preskripsi tersebut menyimpang dari praktik yang sebenarnya dan berdasarkan opini pribadi tentang apa yang seharusnya terjadi.

Pengelolaan Keuangan Daerah

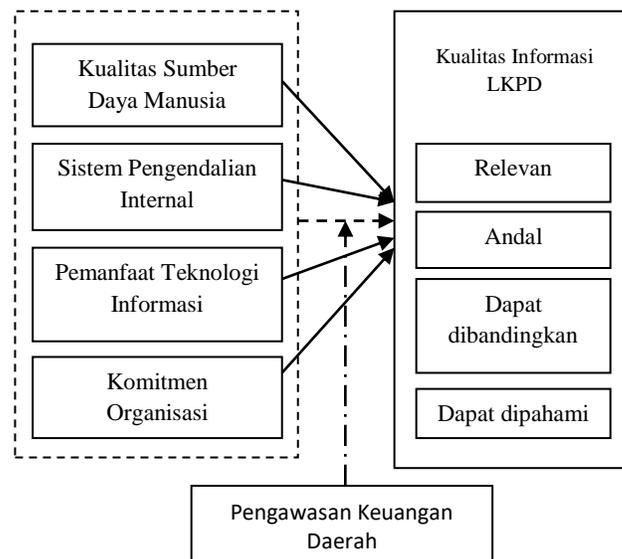
Pemerintah Daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah harus mempertanggung-jawabkan kinerjanya kepada

rakyat. Laporan keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkenaan dengan akuntansi dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundang-undangan antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kerangka Penelitian

Berikut model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

H₁ : Kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

- H₂ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
- H₃ : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
- H₄ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
- H₅ : Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
- H₆ : Pengawasan keuangan daerah mampu memoderasi pengaruh hubungan antara kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA

Metode Penelitian

Survei penelitian dengan pendekatan pembahasan secara deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian meliputi persepsi mengenai kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, pengawasan keuangan daerah dan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Lokasi penelitian dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Data utama penelitian berupa data persepsi kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, pengawasan keuangan daerah dan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui kuesioner terstruktur.

Data pendukung penelitian berupa referensi penelitian terdahulu, jurnal, dan artikel relevan yang diperoleh dari sumber pustaka melalui telaah pustaka dan internet melalui *browsing*, serta studi kepustakaan dan *copy* data.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai subbagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen sejumlah 104 orang. (www.kebumenkab.go.id). Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan empat kriteria. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin yaitu sebanyak 44 pegawai subbagian keuangan SKPD Kebumen. Responden dalam penelitian ini sebanyak 44 orang pegawai subbagian keuangan SKPD Kebumen yang memenuhi kriteria *purposive sampling* yang telah ditentukan.

Teknik Analisis Data

Uji Instrumen Penelitian

Data untuk uji instrumen penelitian dikumpulkan melalui kuesioner dari 30 mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, yang dipilih secara acak sederhana. Selain itu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menggunakan uji statistik korelasi *Product Moment*, dengan kriteria jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka indikator dinyatakan valid dan jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka indikator tersebut dinyatakan tidak valid (Suliyanto, 2005). Dan uji reliabilitas menggunakan teknik *Cronbach Alpha* (Umar, 2003) dengan kriteria apabila nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$, maka indikator reliabel.

Deskripsi Tanggapan Responden

Menggunakan pertanyaan kuesioner terhadap setuju tidaknya responden akan indikator penelitian yang digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dengan kriteria jika nilai *asymmtotic significancy* lebih dari (α) 0,05 maka data telah terdistribusi normal (Suliyanto, 2005). Uji Multikolinieritas menggunakan *Pearson correlation* dan *tolerance value* serta *Varians Inflation Factor* (VIF). Model dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai VIF < 10 dan batas *tol-erance* yang dipakai adalah 0,01 (Suliyanto, 2005). Uji Heteroskedastisitas menggunakan metode *Park Glejser*. Jika nilai probabilitasnya $>$ nilai *alpha*-nya (0,05), maka model tidak mengandung unsur heteroskedastisitas atau $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ pada *alpha* 0,05 (Suliyanto, 2005).

Analisis Pengaruh

Menggunakan model regresi berganda (Ghozali, 2005).

Uji Determinasi

Dengan melihat nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* (Suliyanto, 2005).

Uji Pengaruh

Menggunakan uji pengaruh simultan dan uji pengaruh parsial. Uji pengaruh simultan dengan menggunakan uji F, dengan hipotesis menggunakan *level of significance* 95 persen atau $\alpha = 0,05$ dan *degree of freedom* (df) = $(k-1)(n-k)$, dengan kriteria pengujian H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau Sig. $> \alpha$ (0,05). Dan H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau Sig. $\leq \alpha$ (0,05). Sedangkan uji pengaruh parsial pada *level of significant* (α) = 0,05, dan *degree of freedom* = $(n-k)$, dengan kriteria pengujian

menurut Suliyanto (2011) sisi kanan bahwa H_0 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau $Sig \geq 0,05$ dan H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig < 0,05$.

Uji Moderasi Pengaruh

Menggunakan persamaan regresi variabel moderasi dengan metode selisih mutlak (Suliyanto, 2011). Pada *level of significance* (α) = 0,05 dengan *degree of freedom* = (n – k), jika koefisien regresi selisih mutlak antara *standardized* variabel bebas dan *standardized* variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi ($|ZX-ZZ|$) terhadap variabel tergantung (Y) adalah signifikan maka variabel yang dihipotesiskan sebagai moderasi dinyatakan memoderasi hubungan variabel bebas (X) dengan variabel tergantung (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data dan Pembahasan

Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menunjukkan bahwa r_{hitung} untuk seluruh indikator pernyataan variabel kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan pengawasan keuangan daerah nilainya lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,374, sehingga dapat dinyatakan valid sebagai instrumen penelitian. Dan uji reliabilitas dengan menggunakan hasil perhitungan teknik *Cronbach Alpha* menyatakan bahwa variable Kualitas SDM, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Kualitas Informasi Laporan keuangan Pemerintah Daerah secara berturut-turut adalah 0,934, 0,934, 0,971, 0,950, 0,832, dan 0,920. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga indikator variable dinyatakan reliabel.

Deskripsi Tanggapan Responden

Responden rata-rata menyatakan setuju terhadap item indikator pertanyaan kuesioner untuk variable kualitas sumber daya manusia, system pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan pengawasan keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian. Namun begitu, ada item indikator dari variable kualitas sumber daya manusia yang memiliki hasil “ragu-ragu” dari responden, yaitu item indikator staf yang berkualifikasi dalam jumlah cukup yaitu tingkat pendidikan staf di mana hanya memiliki skor rata-rata item sebesar 3,4. Begitu juga terhadap salah satu item indikator variable komitmen organisasi kebutuhan akan

pekerjaan yaitu kebutuhan untuk tetap tinggal di organisasi di mana hanya memiliki skor rata-rata item sebesar 3,4.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Standardized Residual
N	44
Kolmogorov-Smirnov Z	1.008
Asymp. Sig. (2-tailed)	.262

a. Test distribution is Normal.

Tabel 1 menunjukkan nilai *kolmogorov-smirnov* sebesar 1,008 dengan *asymp.sig* sebesar 0,262, sehingga data penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.	Collinearity	
	Coefficients		Coefficients				Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.780	.441			4.032	.000		
KualitasSDM	.157	.063	.303		2.484	.017	.858	1.166
SPI	.124	.072	.205		1.722	.093	.899	1.112
PTI	.234	.048	.553		4.853	.000	.985	1.015
KO	.133	.049	.319		2.690	.010	.908	1.102

a. Dependent Variable:

KILKPD

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel independen kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,01 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.185	.214		.863	.394
	KualitasSDM	.005	.031	.027	.155	.877
	SPI	.014	.035	.069	.409	.685
	PTI	.008	.023	.055	.345	.732
	KO	-.004	.024	-.027	-.162	.872

a. Dependent Variable: ABRESID

Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi uji heteroskedastisitas (sig t) lebih besar dibandingkan dari nilai alpha ($\alpha = 0,05$) sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Analisis Pengaruh

Tabel 4. Hasil Output Regresi

No	Variabel	Koefisien regresi	t hitung	t tabel
1	Kualitas Sumber Daya Manusia	0,1570	2,484	1,684
2	Sistem Pengendalian Intern	0,1240	1,722	1,684
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,2340	4,853	1,684
4	Komitmen Organisasi	0,1330	2,690	1,684
Konstanta		1,780		
<i>Adjusted R Square</i>		0,450		
F hitung		9,786		
F tabel		2,612		

Persamaan regresi linier berganda :

$$Y = 1,780 + 0,1570 X1 + 0,1240 X2 + 0,2340 X3 + 0,1330 X4$$

Konstanta bernilai 1,780 artinya kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan bernilai 1,780 satuan skor atau yang berarti responden akan beropini tidak setuju pada skala jawaban likert terhadap seluruh indikator pertanyaan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah apabila variabel kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi konstan.

Nilai koefisien regresi variabel kualitas sumber daya manusia sebesar 0,1570. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Secara fungsional dapat dinyatakan bahwa jika kualitas sumber daya manusia meningkat sebesar satu satuan skor, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,1570 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,1240. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Secara fungsional dapat dinyatakan bahwa jika sistem pengendalian intern meningkat sebesar satu satuan skor, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,1240 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,2340. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Secara fungsional dapat dinyatakan bahwa jika pemanfaatan teknologi informasi meningkat sebesar satu satuan skor, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,2340 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel komitmen organisasi sebesar 0,1330. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ikomitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Secara fungsional dapat dinyatakan bahwa jika komitmen organisasi meningkat sebesar satu satuan skor, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,1330 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Uji Determinasi

Tabel 4 menunjukkan nilai adjusted R² sebesar 0,450 yang artinya variasi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi sebesar 45 persen, sedangkan 65 persen dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti, seperti pemahaman standar akuntansi pemerintahan, motivasi, dan pengendalian intern akuntansi.

Uji Pengaruh

Uji Pengaruh Simultan

Berdasarkan hasil perhitungan uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 9,786 sedangkan nilai F tabel sebesar 2,612. Nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan signifikasinya $0,000 < 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh (positif signifikan) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, teruji dan **diterima**.

Uji Pengaruh Parsial

Berdasarkan hasil perhitungan uji t diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel kualitas sumber daya manusia sebesar 2,484 sedangkan t tabel dengan tingkat kesalahan 5 persen sebesar 1,684, maka t hitung lebih besar dari t tabel dengan signifikansi $0,017 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, teruji dan **diterima**.

Berdasarkan hasil perhitungan uji t dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel sistem pengendalian intern sebesar 1,722 sedangkan t tabel dengan tingkat kesalahan 5 persen sebesar 1,684, maka t hitung lebih besar dari t tabel dengan signifikansi $0,043 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, teruji dan **diterima**.

Berdasarkan hasil perhitungan uji t dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 4,853 sedangkan t tabel dengan tingkat kesalahan 5 persen sebesar 1,684, maka t hitung lebih besar dari t tabel dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, teruji dan **diterima**.

Berdasarkan hasil perhitungan uji t dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel komitmen organisasi sebesar 2,690 sedangkan t tabel dengan tingkat kesalahan 5 persen sebesar 1,684, maka t hitung lebih besar dari t tabel dengan signifikansi $0,010 < 0,05$. Dengan demikian

hipotesis yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, teruji dan **diterima**.

Uji Moderasi Pengaruh

Tabel 5. Tabel Ringkasan Hasil Analisis Regresi Moderasi

No	Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	t tabel
1	Kualitas sumber daya manusia (X1)	0,141	2,171	1,684
2	Sistem pengendalian intern (X2)	0,092	0,945	1,684
3	Pemanfaatan teknologi informasi (X3)	0,256	2,830	1,684
4	Komitmen organisasi (X4)	0,150	1,912	1,684
5	Pengawasan keuangan daerah (Z)	-0,005	-0,051	1,684
6	Moderasi1 (X1-Z)	0,007	0,060	1,684
7	Moderasi2 (X2-Z)	-0,005	-0,036	1,684
8	Moderasi3 (X3-Z)	-0,025	-0,185	1,684
9	Moderasi4 (X4-Z)	0,001	0,005	1,684

Konstanta = 4,287
 Adjusted R Square = 37,1
 F hitung = 3,814
 F tabel = 2,612

Persamaan Regresi

$$Y = 4,287 + 0,141X_1 + 0,092X_2 + 0,256X_3 + 0,150X_4 - 0,005Z + 0,007Mod1 - 0,005Mod2 - 0,025Mod3 + 0,001Mod4$$

Konstanta bernilai 4,287 artinya kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan bernilai 4,287 satuan skor atau yang berarti responden akan beropini setuju pada skala jawaban likert terhadap seluruh indikator pertanyaan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah apabila variabel kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, variabel moderasi1, variabel moderasi2, variabel moderasi3 dan variabel moderasi4 konstan.

Nilai koefisien regresi variabel kualitas sumber daya manusia sebesar 0,141. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas

informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Secara fungsional dapat dinyatakan bahwa jika kualitas sumber daya manusia meningkat sebesar satu satuan skor, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,141 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,092. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Secara fungsional dapat dinyatakan bahwa jika sistem pengendalian intern meningkat sebesar satu satuan skor, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,092 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,256. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Secara fungsional dapat dinyatakan bahwa jika pemanfaatan teknologi informasi meningkat sebesar satu satuan skor, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,256 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel komitmen organisasi sebesar 0,150. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Secara fungsional dapat dinyatakan bahwa jika komitmen organisasi meningkat sebesar satu satuan skor, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,150 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel pengawasan keuangan daerah sebesar minus 0,005. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Secara fungsional dapat dinyatakan bahwa jika pengawasan keuangan daerah meningkat sebesar satu satuan skor, maka akan menurunkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,005 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel moderasi¹ sebesar 0,007. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap hubungan kausal antara kualitas sumber daya manusia dengan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Secara fungsional dapat dinyatakan bahwa jika pengawasan keuangan daerah meningkat

sebesar satu satuan skor, maka akan dapat meningkatkan pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,007 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel moderasi² sebesar minus 0,005. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap hubungan kausal antara sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Secara fungsional dapat dinyatakan bahwa jika pengawasan keuangan daerah meningkat sebesar satu satuan skor, maka akan dapat menurunkan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,005 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel moderasi³ sebesar minus 0,025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap hubungan kausal antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Secara fungsional dapat dinyatakan bahwa jika pengawasan keuangan daerah meningkat sebesar satu satuan skor, maka akan dapat menurunkan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,025 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel moderasi⁴ sebesar 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap hubungan kausal antara komitmen organisasi dengan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Secara fungsional dapat dinyatakan bahwa jika pengawasan keuangan daerah meningkat sebesar satu satuan skor, maka akan dapat meningkatkan pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,001 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Uji Pengaruh Analisis Regresi Moderasi

Uji Pengaruh Simultan

Hasil analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} (3,814) lebih besar dari nilai F_{tabel} (2,612) dan nilai signifikansinya 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi moderasi yang terbentuk dinyatakan tepat (*goodness of fit*) dan hipotesis yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah mampu memoderasi pengaruh hubungan kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi

informasi dan komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, teruji dan **diterima**

Uji Determinasi

Tabel 3 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,371, artinya variasi perubahan naik atau turunnya hubungan antara kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap variabel kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah hanya 37,1 persen diperkuat oleh variabel pengawasan keuangan daerah, sedangkan sebesar 62,9 persen variasi perubahan naik atau turunnya hubungan antara kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap variabel kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah diperkuat oleh variabel moderasi lain yang tidak diteliti, seperti perubahan regulasi, perubahan teknologi informasi dan faktor eksternal lain.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian **hipotesis pertama** menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini tidak berbeda dengan hasil penelitian Indrawati, dkk (2013) dan Suryani (2013).

Hasil pengujian **hipotesis kedua** menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan hasil penelitian Indrawati (2013) dan Gusrita dkk (2012).

Hasil pengujian **hipotesis ketiga** menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan hasil penelitian Sukmaningrum (2012) dan Indrawati, dkk (2013).

Hasil pengujian **hipotesis keempat** menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) dan Indrawati, dkk (2013).

Hasil pengujian **hipotesis kelima** menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah

daerah. Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan hasil penelitian Silviana (2012) dan Dwi Yusufadi (2013).

Hasil pengujian **hipotesis keenam** menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah mampu memperkuat pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hubungan kausalitas tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan keuangan daerah, maka akan semakin kuat pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini tidak berbeda dengan hasil penelitian Suryani (2013).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasar hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi (secara simultan) berpengaruh (positif signifikan) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Pengawasan keuangan daerah mampu memoderasi pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dan secara parsial dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

Implikasi

Berdasar analisis data, pembahasan, dan kesimpulan dapat diimplikasikan bahwa indikator kuesioner variabel kualitas sumber daya manusia mendapat tanggapan ragu-ragu dari responden khususnya indikator tingkat pendidikan staf, sehingga kualitas sumber daya manusia pada subbagian keuangan satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kebumen dapat ditingkatkan dengan cara memberikan akses, fasilitas dan apresiasi atas keikutsertaan pelatihan atau *training* khususnya bidang pelaporan keuangan, serta menerima atau menambah tenaga ahli bidanga akuntansi (akuntan) secara internal melalui rotasi, *rolling* atau *uprading*. Disamping itu, indikator

kuesioner variabel komitmen organisasi mendapat tanggapan ragu-ragu dari responden khususnya indikator kebutuhan untuk tetap tinggal di organisasi, sehingga komitmen organisasi di satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kebumen dapat ditingkatkan dengan cara menciptakan suasana kenyamanan kantor yang dapat meningkatkan rasa *sense of belongingness* yaitu antara lain dengan cara menanamkan rasa percaya diri kepada pegawai, memberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas, memberikan apresiasi atas pekerjaan yang telah dilakukan dan melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan, sehingga kinerja pegawai akan meningkat. Dengan demikian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditentukan akan tercapai yaitu berupa laporan keuangan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2014. Data Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sarjana Kabupaten Kebumen. Diakses 3 Februari 2014 dari www.kebumenkab.bps.go.id.
- BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2010. Diakses 10 Oktober 2013 dari www.bpk.go.id
- BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012. (www.bpk.go.id, diakses 4 Oktober 2013).
- Dwiyusufadi, Seno. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis – PP No 24 Tahun 2005*. BPFU UGM. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BP-Undip. Semarang
- Gusrita, Ririn, dkk. 2012. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kab. Inhil)*. Jurnal Ilmiah.
- Indrawati, Dwi Anita, dkk. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang)*. Jurnal ilmiah.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. 2013. *Kabupaten Kebumen Memperoleh Penghargaan ICT Pura 2013*. Diakses 25 Desember 2013 dari <http://kebumenkab.go.id>
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan ...

- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
- Silviana, 2012. *Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat*. SNAB. Bandung
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Suliyanto. 2005. *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. ANDI. Yogyakarta.
- Suryani, Indri Zulis. 2013. *Faktor Determinan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Pengawasan Keuangan Daerah sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang)*. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. (Tidak Dipublikasikan).
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Warta BPK. 2013. *Pemerintah Kabupaten Kebumen, Peraih WTP Tahun 2011 Komitmen dan Kerja Keras, Modal Utama "Walet Emas"*. Edisi Maret. (www.bpk.go.id, diakses 7 Oktober 2013).
- Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. 2010. *Pengaruh Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*. SNA XIII Purwokerto